

	News Title : Merespons Ombusman, Bappebti Lakukan Penanganan Aduan Nasabah Sesuai Peraturan	
	Media Name : megapolitanpos.com	Journalist : Achmad Sholeh
	Publish Date : 15 January 2024	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 1,500,000
	Resources : Kasan (Plt. Kepala Bappebti)	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Nasional	Topic : Bappebti Selesaikan Aduan Nasabah secara Berjenjang

• INDEX BERITA • 3

Lakukan Penanganan Aduan Nasabah Sesuai Peraturan



Achmad Sholeh@sholeh15 Jan 2024, 14:57:05 WIB



• INDEX BERITA • 3

MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta–Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menangani aduan dan menyelesaikan pengaduan secara berjenjang. Seluruh proses pemeriksaan, gelar kasus, dan pengenaan sanksi telah dilakukan sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK).

Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Baca Lainnya :

- Terkait PBK, Bappebti Berkomitmen Mempercepat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
- Pemerintah Berkomitmen Memperbaiki Tata Kelola Perdagangan Minyak Kelapa Sawit
- Dukung Kinerja Perdagangan Indonesia, Bappebti Dorong Peningkatan Capaian Kinerja Perdagangan Berjangka Komoditi
- Presko Bersama Pengaduan KUR Ditutup, KemenKopUKM dan Ombudsman Masih Temui Kendala
- Perdagangan Kripto Tahun 2022 Menurun

• INDEX BERITA • 3

Demikian diutarakan Plt. Kepala Bappebti Kasan merespons pemberitaan Ombudsman RI terkait penanganan pengaduan nasabah pialang berjangka.

“Bappebti menangani aduan dan menyelesaikan pengaduan secara berjenjang. Artinya, Bappebti tidak pernah diam dalam melindungi nasabah. Sanksi administratif yang dikenakan Bappebti merupakan hasil proses akhir atas pemeriksaan tim Bappebti pada penanganan pengaduan atas pelanggaran ketentuan yang sifatnya administratif,” jelas Kasan di Jakarta, Minggu (14/1).

Kasan menambahkan, terkait permintaan pengembalian dana atau ganti rugi kepada Bappebti, disediakan jalur penyelesaian melalui pengadilan negeri atau proses arbitrase pada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAKTI) sesuai peraturan perundang-undangan di bidang PBK. Hal ini sesuai pilihan penyelesaian perselisihan hukum yang tercantum dalam dokumen perjanjian pemberian amanat nasabah.

• INDEX BERITA • 3

menyatakan bahwa strategi pengawasan tersebut Bappebti menemuinya secara signifikan melalui penguatan regulasi dan literasi; integrasi sistem aplikasi; dan penerapan sistem rating pialang berjangka.

Berikutnya, penyelesaian penanganan pengaduan dan penguatan kerja sama seperti dengan Kejaksaan Agung RI.

Bappebti juga merupakan anggota yang aktif dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Di forum internasional, Indonesia menjadi anggota tetap Financial Action Task Forces (FATF) pada rapat pleno pada 25 Oktober 2023 silam di Paris, Prancis.

Kesengajaan tersebut menunjukkan peran aktif Bappebti dalam memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Selama 2023, imbuh Kasan, Bappebti menerima 177 pengaduan nasabah terhadap perusahaan pialang berjangka. Dari sejumlah aduan tersebut, 82 pengaduan nasabah telah selesai ditangani Bappebti sedangkan 95 kasus pengaduan masih dalam proses penyelesaian.

• INDEX BERITA • 3

Untuk mengurangi jumlah aduan tersebut, hal terpenting yang dilakukan Bappebti adalah penguatan regulasi dan literasi serta optimalisasi implementasi terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi PBK (LSP-PBK).

LSP PBK didirikan berdasarkan Surat Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) No. Kep.2048/BNSP/IX/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Lisensi LSP-PBK.

Saat ini, telah terdapat 48 asesor yang memiliki sertifikat LSP-PBK dari BNSP. Dalam waktu dekat, LSP-PBK akan melaksanakan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang PBK untuk Wakil Pialang Berjangka (WPB) dan Wakil Penasihat Berjangka (WPA) melalui ujian kompetensi dan memberikan Tanda Lulus Ujian Profesi (TLUP).

Untuk menjadi WPB atau WPA, pemegang TLUP harus mengajukan izin kepada Bappebti untuk dinilai kembali kelayakannya. Melalui skema bertahap ini, diharapkan SDM di bidang PBK akan lebih kompeten sesuai dengan bidang keahliannya, baik sebagai WPB maupun WPA.

• INDEX BERITA • 3

Penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi dan SDM berkualitas adalah salah satu strategi taktis Bappebti bersama para penangku kepentingan dalam meningkatkan kinerja PBK.

Strategi lainnya yaitu optimalisasi bursa crude palm oil (CPO), penguatan ekosistem bursa aset kripto, peningkatan transaksi multilateral, antara lain komoditas timah dan emas digital, serta pengembangan komoditas strategis lainnya. Berikutnya optimalisasi sistem resi gudang dan penguatan pasar lelang komoditas serta perbaikan tata kelola layanan Bappebti yang berkelanjutan. (Reporter: Achmad Sholeh)